

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Rembang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir utara pulau Jawa. Kabupaten Rembang memanfaatkan berbagai sumber daya lokal untuk mendorong perekonomian lokal. Landasan wilayah ini adalah industri pertanian. Namun, sejumlah perusahaan tambang batugamping saat ini membahayakan kelangsungan hidup sektor pertanian di Rembang. Salah satu jenis lanskap karst adalah batugamping. Rembang memiliki karst, yang terdiri dari formasi batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Kawasan Watuputih di Kecamatan Gunem merupakan salah satu kawasan terspesialisasi di Kabupaten Rembang yang berpotensi untuk penambangan karst. Sebuah wilayah karst bernama Watuputih terdapat di Pegunungan Kendeng bagian Utara.

Saat ini Rembang sedang mengerjakan proyek pembangunan. Kabupaten Rembang memiliki akses terhadap sumber daya alam berupa batugamping yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam produksi semen. Kabupaten ini terletak di sepanjang pesisir utara Jawa, yang juga terbentang di pegunungan karst Kendeng Utara. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk bermaksud mendirikan pabrik di Kabupaten Rembang dan memanfaatkan sumber daya tersebut setelah menyadari potensinya. Penduduk lokal di sekitar kawasan pembangunan, khususnya para petani yang dekat dengan lokasi pembuatan semen, telah menanggapi gagasan ini dengan berbagai cara, baik secara positif maupun negatif. Terlepas dari perbedaan pendapat yang dianut oleh mereka yang mendukung dan menentang pendirian pabrik semen, upaya ini juga mengakibatkan perselisihan sosial.

Secara umum, ketidaksepakatan antara dua pihak atas suatu masalah tertentu pada waktu dan tempat yang sama dapat digunakan untuk menjelaskan konflik atau perselisihan. warga yang menentang proyek tersebut, warga yang mendukungnya, dan pemerintah semuanya terlibat dalam sengketa seputar pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Pemerintah dan masyarakat yang mendukung pembangunan pabrik semen berpendapat bahwa hal itu akan menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, warga yang menentang proyek ini berpendapat bahwa pembangunan pabrik semen dapat merusak lingkungan dan mengancam ketersediaan air.<sup>1</sup>

Potensi Kota Rembang di Jawa Tengah secara agresif memanfaatkan potensi sumber dayanya saat ini untuk memperkuat ekonomi lokal. Sumber pendapatan utama bagi warga Kabupaten Rembang adalah pertanian. Saat ini, keberadaan beberapa perusahaan tambang yang menggunakan karst-sejenis batuan kapur dengan struktur mirip karst-mengancam keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Rembang. Rembang merupakan rumah bagi jenis batuan bernama kars yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan semen. Wilayah Watuputih di Kecamatan Gunem merupakan salah satu lokasi penambangan karst yang potensial di Kabupaten Rembang.

Kelemahan dari rembang adanya kegiatan pertambangan ini berdampak negatif terhadap lingkungan, baik dari segi sosial maupun fisik. Salah satu efek fisik yang teramati sejak penambangan dimulai pada tahun 1998 adalah adanya parit-parit yang cukup besar yang masih ada setelah penambangan selesai. Erosi pantai dan degradasi jalan merupakan efek fisik lainnya. Secara sosial, saat ini terjadi ketegangan di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal akibat PT. Usulan perpanjangan izin pertambangan yang didukung pemerintah oleh Antam.

Khususnya bagi masyarakat awam, gagasan pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi pedoman atau pedoman pembangunan tampaknya tidak memberikan dampak yang sebesar-besarnya. Masyarakat terkadang merasa terpinggirkan (deprivacy) dan terabaikan dalam kebijakan pembangunan yang lebih berpusat. Pendekatan sentralisasi dari pemerintah pusat membuat masyarakat di tingkat bawah merasa harus tunduk pada kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, konsep pembangunan yang lain masih cenderung lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama atau indikator

---

<sup>1</sup>Hidayatullah, U., Rini, H. S., & Arsal, T. (2016). Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik Pt. Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Solidarity*, 5(1).

kesejahteraan masyarakat, meskipun banyak teori yang telah mengkritik pendekatan ini. Namun, dalam kenyataannya, paradigma ekonomi murni masih mendominasi upaya pembangunan.

Kenaikan permintaan pasar semen tahunan berdampak pada meningkatnya permintaan bahan baku semen. Hal ini menjadikan badan usaha milik negara (BUMN) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang membuat berbagai jenis semen, sangat ingin menambang batuan karst. Mengingat pentingnya persyaratan bahan baku tersebut, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk berminat menambang bahan baku semen di wilayah Watuputih. Selain kars, dua material lain yang digunakan untuk membuat semen tambang Indonesia di Kabupaten Gunem adalah tanah liat dan batugamping.

Keterlibatan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam kegiatan penambangan tidak terlepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pengelolaan lahan dan pemberian izin lingkungan untuk kegiatan penambangan kepada perusahaan tersebut. Terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 yang berkaitan dengan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (yang sejak 20 Desember 2012 menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk) menjadi dasar untuk menjalankan kegiatan penambangan di wilayah Pegunungan Kendeng, khususnya di daerah cekungan Watu Putih yang berada di wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Pembangunan PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem memicu berbagai respons dari masyarakat yang beragam, mulai dari yang mendukung hingga menentang pembangunan pabrik. Kelompok yang menentang proyek ini telah mengambil berbagai langkah penolakan, termasuk mengajukan gugatan terhadap Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda terkait proyek ini, yang akhirnya menyebabkan timbulnya konflik yang berlarut-larut.

Konflik terkait pembangunan pabrik semen bermula dari SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2012, dianggap melanggar peraturan yang berlaku. Kawasan karst Watuputih

yang perlu dilindungi merupakan kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pertambangan. Pasal 63 peraturan daerah tentang tata ruang (RT/RW) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 yang menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung, dan Pasal 19 Perda Rembang Nomor 14 tahun 2011 yang menetapkan Cekungan Watuputih sebagai kawasan lindung, dianggap dilanggar dengan menggunakan areal Cekungan Air Tanah Watuputih untuk kegiatan penambangan batugamping sebagai bahan baku semen.<sup>2</sup>

Pembangunan pabrik semen ditentang oleh penduduk setempat, dan mereka masih aktif memprotes. Ada ketidaksepakatan mengenai keuntungan dan kerugian pembangunan pabrik semen di antara lima desa di wilayah ring-1, khususnya di desa Timbrangan dan Tegaldowo. Poster-poster yang dibuat oleh penduduk setempat, yang menentang dan mendukung pembangunan fasilitas semen, menyoroti perbedaan pendapat ini. Di sepanjang jalan raya desa, papan reklame telah dipasang di samping poster, yang berfungsi untuk lebih menekankan perbedaan perspektif di antara penduduk setempat. Poster dan baliho ini diposisikan secara strategis agar mudah dilihat dan untuk memperjelas tempat mana yang didukung oleh masyarakat. keuntungan atau kerugian.

Di dalam masyarakat, perjuangan memunculkan jejaring sosial politik, ekonomi, dan lingkungan yang baru. Jejaring sosial ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, dengan tujuan membantu kelompok pro dan kontra. Pialang kekuasaan dan pemilik modal membangun jaringan politik dan ekonomi dalam upaya mempertahankan posisi otoritas mereka dan mempertahankan kendali atas modal atau sumber daya ekonomi. Jaringan lingkungan, di sisi lain, dirancang untuk melindungi SDA yang sudah ada agar tidak menjadi milik pemilik modal sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan. (Khilya Khusnia dikutip)

Menurut keterangan yang diberikan, lingkungan yang mendukung pembangunan pabrik semen tersebut merupakan bagian dari jaringan ekonomi yang didukung langsung oleh PT Semen Indonesia. Warga di daerah tersebut didorong untuk bersaing satu sama lain untuk menjual tanah mereka dengan harga

---

<sup>2</sup> Khusnia, K., & Warsito. (2018). Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2)

tinggi karena PT Semen Indonesia menawarkan imbalan yang cukup besar kepada mereka yang menjual tanah mereka untuk proyek industri tersebut. Selain itu, PT Semen Indonesia mempekerjakan penduduk setempat yang belum pernah bekerja untuk memberi mereka kesempatan kerja di fasilitas tersebut. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, perusahaan juga menyumbangkan bekal untuk kegiatan desa dan pembangunan fisik, serta bantuan sembako, untuk memastikan masyarakat menerima pabrik semen dan mendukung proyek pembangunan tersebut.

Dalam skala yang lebih kecil, warga telah secara langsung mengalami dampak negatif dari kegiatan penambangan, seperti penurunan debit air dan kerusakan lingkungan. Misalnya, kegiatan penambangan perorangan pada tahun 2009 mengakibatkan berkurangnya debit air bersih di berbagai komunitas di Kecamatan Jualan Kabupaten Rembang. Jumlah air yang dibuang berkurang menjadi 600 liter per detik dari 1.250 liter per detik pada awalnya. Sumber air yang dimanfaatkan desa-desa terdekat untuk mengairi lahan pertaniannya terkena dampak penurunan ini. Akibatnya, satu-satunya sumber pengairan persawahan yang digunakan petani setempat adalah air hujan, yang menurunkan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat. Akibatnya, banyak individu yang sebagian besar adalah petani menganggap pembangunan pabrik semen cukup membingungkan. Mengingat kemungkinan dampak merugikan proyek tersebut terhadap hasil pertanian dan pendapatan mereka sebagai petani, masuk akal jika mereka menolaknya.

Dengan PT Semen Indonesia sebagai investor yang akan mendirikan pabrik semen di wilayah tersebut, pemerintah Kabupaten Rembang telah mengadopsi pendekatan berbasis investasi untuk pembangunan ekonomi. Diantisipasi bahwa kedatangan investor akan merangsang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya, beberapa anggota masyarakat bahkan menentang kebijakan tersebut. Banyak orang yang keberatan dengan perkembangan ini karena mereka yakin akan berdampak buruk. Mereka khawatir sumber daya alam yang ada saat ini akan dirugikan dengan keberadaan pabrik semen di Rembang. Penolakan ini semakin intensif dan berkembang menjadi gerakan sosial yang semakin besar.

Kekhawatiran masyarakat di Kendeng Rembang timbul akibat rencana pendirian pabrik semen di wilayah tersebut, khususnya di Pegunungan Kendeng di Kecamatan Gunem. Masyarakat merasa khawatir terkait dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan. Dikenal sebagai Pegunungan Karst Kendeng Utara Kabupaten Rembang, pegunungan Kendeng yang merambah wilayah tersebut tergolong kawasan Karst. Cekungan air tanah dan batugamping yang ditemukan di pegunungan karst ini merupakan sumber daya vital yang diandalkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, banyak yang percaya bahwa pembangunan pabrik semen dapat menyebabkan penggunaan air tanah yang berlebihan di sana..

Sebelum Abdul Hafidz mengambil alih kekuasaan, seorang bupati Kabupaten Rembang sebelumnya telah mengusulkan pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia. Izin untuk membangun pabrik semen di wilayah pegunungan Kendeng diberikan pada masa pemerintahannya. Hal ini dilakukan karena kepemilikan tanah lokal oleh Bupati hampir 50%. Setelah itu, investor yang membeli tanah tersebut ternyata adalah PT Semen Indonesia. Sebelum tahun 2010, ada rencana untuk membangun pabrik semen di Rembang, dan kekhawatiran tentang rencana pembangunan ini pertama kali muncul di bawah Bupati Moch. Aturan Salim.<sup>3</sup>

Beberapa orang termasuk warga desa Rembang sudah mengetahui rencana pembangunan saat itu. Namun izin pertambangan dan bangunan PT Semen Indonesia baru disetujui pada tahun 2012. Karena PT Semen Indonesia mendirikan pabrik di atas tanah yang sengaja dijual oleh Moch Salim, kedatangan mereka pun tak terhindarkan. Investasi ini pada dasarnya memiliki niat yang baik, tetapi justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga terkait rencana pembangunan ini. Pertama kali PT Semen Indonesia benar-benar terlihat adalah pada tahun 2014. Hingga saat ini, pada tahun 2017, PT Semen Indonesia telah selesai membangun pabriknya. Meskipun ini pertama kali menjadi masalah lokal, gubernur Jawa Tengah akhirnya menyetujui izin pertambangan dan pembangunan yang menjadi masalah nasional. Terkait proyek ini, Bupati Rembang yang

---

<sup>3</sup> Pangayom, G. S., Astuti, P., & Sardini, N. H. (2017). *Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia* 6(4).

menjabat sejak tahun 2016 hingga 2021 tidak lebih dari menjalankan tugasnya dan mematuhi perintah gubernur.

Konflik tersebut telah menciptakan struktur sosial baru dalam masyarakat, yang melibatkan jaringan politik, ekonomi, dan lingkungan. Jaringan sosial ini dibentuk oleh berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan, baik yang mendukung maupun menentang pembangunan pabrik Semen Indonesia. Jaringan politik dan ekonomi muncul antara mereka yang memegang kekuasaan dan pemilik modal yang berusaha untuk mempertahankan dominasi mereka serta mengendalikan sumber daya ekonomi dan modal. Jaringan lingkungan, yang mempertimbangkan faktor keberlanjutan dan kelestarian lingkungan, dibentuk sementara itu untuk mencegah sumber daya alam yang ada berakhir di tangan pemilik modal.

Kelompok lingkungan yang didirikan menawarkan bantuan kepada masyarakat yang menentang pembangunan pabrik semen tersebut. Pendukung kelompok tersebut antara lain Yayasan Kendaraan Lingkungan Indonesia (Walhi) dan Jaringan Komunitas Peduli Pegunungan Kendeng (Jmppk), yang memandang pembangunan pabrik semen di kawasan Cekungan Watuputih berpotensi merusak lingkungan. Mereka khawatir pembangunan ini dapat menurunkan pasokan air wilayah karst dan berdampak buruk pada panen pertanian. Dua LSM yang paling vokal menentang pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati dan Rembang adalah Jmppk dan Walhi. Mereka yang menentang pembangunan pabrik semen memanfaatkan JMPPK sebagai saluran untuk mencapai tujuan mereka, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan lainnya turut prihatin

Di sisi ekonomi, jaringan terbentuk di antara masyarakat yang menentang pembangunan, terutama yang memiliki lahan pertanian. Mereka khawatir bahwa pabrik semen dapat mengakibatkan penurunan pasokan air di daerah tersebut, yang dapat berdampak pada pertanian. Faktanya, ada tujuh mata air di sekitar lokasi pembangunan pabrik yang digunakan oleh penduduk setempat untuk irigasi sawah. Mingming Lukiarti, seorang pendamping masyarakat dari JMPPK, dalam wawancara dengan Kompas, menyebutkan bahwa sebelum rencana pembangunan pabrik semen ada, telah terjadi aktivitas penambangan, baik oleh individu maupun perusahaan kecil. Di tingkat yang lebih kecil, warga telah merasakan sendiri

dampak penambangan tersebut, termasuk penurunan pasokan air dan kerusakan lingkungan. Contohnya, di beberapa desa di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, debit air bersih turun dari 1.250 liter per detik pada tahun 2009 menjadi 600 liter per detik akibat aktivitas penambangan oleh individu.

Selain masyarakat lokal dan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga terlibat dalam konflik yang muncul sehubungan dengan pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Konflik ini dipicu oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Terlibat dalam konflik ini adalah masyarakat pendukung dan penolak pembangunan pabrik, LSM, pemerintah, serta PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang berkontribusi pada timbulnya konflik di seluruh spectrum.<sup>4</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya Konflik PT Semen Indonesia terhadap masyarakat Desa Tegaldowo dalam menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia?
- 2) Bagaimana cara masyarakat Desa Tegaldowo dengan PT Semen Indonesia menyelesaikan konflik dalam menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana latar belakang, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya adanya konflik PT Semen Indonesia yang terjadi selama pembangunan pabrik semen berlangsung dan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui cara menyelesaikan konflik dalam menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan sumber kemanfaatan, antara lain:

---

<sup>4</sup>Hidayatullah, U., Rini, H. S., & Arsal, T. (2016). Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik Pt. Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Solidarity*, 5(1).

a. Secara teoritis, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memajukan penyelidikan ilmiah dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana konflik sosial dipelajari dari perspektif ilmu politik. Dengan kata lain, penulis dan masyarakat harus mendapatkan keuntungan dari penelitian ini. Keuntungan yang ditawarkan oleh penulis penelitian tersebut di atas antara lain harapan bahwa temuan penelitian tersebut akan berkontribusi pada pengetahuan dan menjadi model untuk penelitian masa depan yang serupa.

b. Secara akademis, Penulis berharap temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kurikulum ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan parpol Indonesia

c. Secara praktis, untuk mengidentifikasi isu-isu spesifik dan menjadi sumber penyelesaian isu-isu terkait konflik yang muncul di masyarakat. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keahlian praktis kepada para sarjana sehingga mereka dapat memahami dan berkontribusi pada isu-isu kemasyarakatan saat ini. dapat menawarkan kesadaran umum tentang komunitas untuk membantunya menyadari masalah di sekitarnya dan memilih tindakan terbaik.

d. Secara sosial, peneliti berharap masyarakat khususnya masyarakat yang mengikuti kegiatan politik di kota Rembang dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai acuan.

e. Secara metodologis, penelitian di masa depan diantisipasi untuk menggunakan karya ini sebagai referensi sehingga dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai pendekatan, taktik, dan metodologi lainnya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

BAB I: Bab ini akan menjabarkan isu-isu di balik sengketa yang terjadi antara PT Semen Indonesia dan masyarakat Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem pada tahun 2015-2018 atas pembangunan pabrik perusahaan di Rembang, Jawa Tengah. Mengenai bagaimana masalah dirumuskan, serta tujuan dan keuntungan penelitian, hal ini dapat menjadi sumber penyelidikan di masa mendatang. Penulis juga menggunakan pendekatan, strategi pengumpulan data, alat analisis data, dan pola pikir saat melakukan penelitian.

BAB II: Penulis akan membahas penelitian sebelumnya dengan topik dan studi serupa yang membandingkan penelitian sebelumnya di Bab 2. Penulis juga menawarkan teori-teori terkait yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kesulitan penelitian.

BAB III: Bab ketiga ini menjelaskan teknik penelitian yang relevan beserta periode, lokasi, dan ruang lingkup penelitian. serta cara mengumpulkan, menangani, dan menampilkan data.

BAB IV: Sengketa antara PT Semen Indonesia dengan masyarakat yang tinggal di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem akan dibahas dalam bab ini.

BAB V: Bab ini memaparkan data-data yang dikumpulkan di lapangan dan memberikan jawaban atas isu-isu yang ditimbulkan oleh rumusan topik penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan sumber-sumber sastra.

BAB VI: Rekomendasi dan kesimpulan penulis dari penelitian yang telah selesai dimasukkan dalam bab terakhir ini.

